

## **ABSTRAK**

Penggunaan surat keterangan domisili dalam proses transaksi Jual-Beli tanah pertanian, membawa dampak negatif dalam terjadinya pemilikan tanah absente yaitu tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar wilayah kecamatan letak tanah tersebut berada, sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam apakah dalam pelaksanaan penggunaan surat keterangan domisili telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, sehingga penulis merumuskan beberapa permasalahan yang pertama adalah bagaimana penggunaan surat keterangan domisili dalam hal jual-beli tanah pertanian jika pembelinya berdomisili diluar kecamatan objek tanah pertanian yang dibeli, sudah sesuaikah dengan aturan kepemilikan tanah pertanian secara absente, lalu permasalahan yang kedua adalah bagaimana akibat hukum dari penggunaan Surat Keterangan Domisili dalam hal jual-beli tanah pertanian secara absente.

Pada pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-empiris.pendekatan yuridis digunakan untuk dapat menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Surat Ketarangan Domisili dalam pengaturan hukum Pemilikan Tanah Absente berkaitan dengan praktek jual beli di Kantor Tanah Kabupaten Grobogan, sedangkan pendekatan empiris yang digunakan untuk dapat menganalisis hukum yang ada dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan.

Dalam hasil penelitian pada masalah pertama dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan jual-beli tanah pertanian (absente) dengan menggunakan surat keterangan domisi yang tidak sesuai dengan KTP tidak diperbolehkan dalam aturan hukum yang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, sehingga penggunaan surat keterangan domisili seharusnya sesuai dengan domisili asli, dan dimaknai sebagai benar-benar tempat tinggal untuk menetap, sedangkan permasalahan kedua dapat di tarik kesimpulan bahwa pada akibat hukum dalam penggunaan surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan tempat tinggal asli dalam hal jual beli tanah pertanian, menjadikan dalam hal peralihan hak pada kantor pertanahan menjadi tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan syarat administratif pada peraturan badan nasional Nomor 1 tahun 2010, dan juga peralihan hak jual-beli tanah pertanian yang menggunakan surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya dapat batal demi hukum.

Masukan dalam pengaturan pemilikan tanah absente yaitu, harusnya pemerintah membuat aturan khusus dan tersendiri agar lebih jelas dalam pelaksanaannya sehingga para aparat negara lebih jelas untuk menjalankan larangan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya pemilikan tanah absente menggunakan surat keterangan domisili tidak terjadi lagi dan juga para aparat negara harus lebih tegas dalam melaksanakan aturan larangan tanah absente tersebut dengan cara menolak secara tegas dan melakukan sosialisasi bagi masyarakat, agar paham akan aturan larangan pemilikan tanah absente.

## **Kata Kunci : Surat keterangan Domisili,Jual-Beli, Tanah Absente**

### **ABSTRAK**

The use of the Certificate of Domicile in the process of sale of Agricultural Land Sale, can be negative in the absence of land ownership of agricultural land whose owner is located outside the subdistrict area of the land where the writer wishes to study more in whether in the implementation of the use of the certificate of domicile has been in accordance with the provisions of its enforcement, so the author formulated some of the first issues in how the use of a certificate of domicile in terms of sale of agricultural land if the buyer is domiciled outside the subdistrict of the purchased agricultural land, the second is how the legal consequence of the use of Domicile Certificate in the absence of sale of agricultural land.

In the approach the writer uses is a juridical-empirical approach. the juridical approach is used to analyze the rules related to Domicile Litigation in the legal arrangement of Absente Land Ownership in relation to the practice of sale and purchase at the Land Office of Grobogan Regency, while the empirical approach used to analyze the existing law is seen as the behavior of people patterned on the life of society who always interact and deal with social aspects.

In the result of the research on the first problem it can be concluded that in the implementation of sale of agricultural land (absente) by using domicile certificate that is not in accordance with ID card is not allowed in the rule of law which is in effect as opposed to Article 10 of Agrarian Basic Law year 1960, so the use of the certificate of domicile should correspond to the original domicile, and is understood to be the real settlement for settlement, while the second problem can be drawn to the conclusion that the legal consequences in the use of a domicile certificate that does not correspond to the original residence in the case of sale buy agricultural land, making the transfer of the right to the land office becomes ineffective because it does not comply with the administrative requirements of national regulation No. 1 of 2010, as well as transfers of agricultural land purchase rights using non-compliant landlords t the real can be null and void.

Inputs in the absence of land ownership arrangements, that is, should the government make special and separate rules to be more clear in its implementation so that the state apparatus is more clear to carry out the prohibition, so that in the course of its implementation the landowner absentees with the certificate of domicile does not happen again as well as state apparatuses should more strictly in implementing the absence of the abolition of the land by decisively decline and socialization for the public, to understand the rule of law prohibiting land ownership.

Keywords: Domicile, Selling, Absentee Certificate